

**ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PELALAWAN DALAM
PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU
TAHUN 2013-2015**

Oleh:

Dedy Setiawan

E-mail: dedysetiawaan@yahoo.com

Preceptor: Dr. H. Ali Yusri, MS

*Department of Public Administration FISIP University of Riau
Bina Widya Campus Jl H. R. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293*

ABSTRACT

The purpose of this research is to get the performance of Community Empowerment and Village Government (BPMPD) of Pelalawan Regency in Integrated Village Development Assistance Management without having to see the big amount of budget produced. The implementation of this program has not been implemented in an optimal manner that is not effective in the Village Community Empowerment and Village Government Pelalawan District.

This research uses qualitative approach, this research type is descriptive research. The focus of the research is the performance or human resources available at the Village Community Empowerment and Village Administration Agency Pelalawan District. The informants in this research are the Head of Community Empowerment and Village Governance, Documentation. Data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique.

The results showed that the implementation of village development assistance management in measuring from the perspective of performance program of Community Empowerment Board and Village Government can not be said good because it can not do development equally. The recommendation of this research is for human resources of Community Empowerment and Village Government of Pelalawan Regency is expected that its performance does not decrease and for the village community is expected participation and cooperation in village development effort conducted by Community Empowerment Board and Village Government Pelalawan Regency

Keywords: *Performance, and Human Resources.*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “pemberian otonomi luas pada daerah pada hakekadnya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”, serta aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan prioritas Nasional dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang mempunyai visi “*menjadi fasilitator penggerak pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa menuju masyarakat dan pemerintahan desa yang mandiri, maju dan sejahtera*” menetapkan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi program/kegiatan yang sangat strategis. Program ini bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembinaan sosial budaya local, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pendukung Kepala

Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- c. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi Desa, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna serta Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- f. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan Desa Terpadu yang selanjutnya disingkat PDT merupakan sistem manajemen pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dan kawasan berdasarkan perencanaan partisipatif seluruh lapisan masyarakat,

koordinasi antar pemeran pembangunan, yang berbasis potensi unggulan Desa menuju kemandirian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pembangunan Desa Terpadu (PDT) adalah sebuah program pembangunan Desa yang berbasis masyarakat dan kawasan dengan mengedepankan adanya integritas antar sektor, kerjasama antar-Desa, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Jumlah anggaran kegiatan pembangunan Desa terpadu sejak Tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000 dengan (8) delapan Desa percobaan yang ditunjuk langsung dari pusat dengan pencapaian target 95%, karena program kegiatan pada Tahun 2013 berhasil, maka pada Tahun 2014 bantuan dana untuk pembangunan Desa terpadu ditetapkan sebanyak 12 Desa disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan pencapaian target 96%, Namun pada Tahun 2015 jumlah bantuan dana Desa terpadu berkurang menjadi Rp.25.000.000. Sedangkan seharusnya apabila pencapaian target program tersebut tercapai seharusnya jumlah anggaran program tersebut dari tahun ke tahun meningkat bukan sebaliknya ini dikarenakan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Pelalawan yang masih banyak yang dimana pembangunan Desa masih tergantung dari bantuan pemerintah daerah sehingga peneliti tertarik meneliti ini apakah ada pengaruhnya antara kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pengelolaan dana Pembangunan Desa Terpadu dengan jumlah bantuan dana yang diperoleh.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang mengacu pada masalah penelitian yang

ada, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun 2013-2015?**

KERANGKA TEORI

Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (*job performance*) Sumber Daya Manusia, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan

bahwa, “Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik atau material maupun non fisik atau non material. Menurut Simanjutak (2005), ”Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”. Foster dan Seeker (2001) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan”.

Indikator Kinerja

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja pegawai adalah mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain :

1. Kuantitas Kerja
Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya.
2. Kualitas Kerja
Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan volume kerja.
3. Pemanfaatan Waktu
Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan.
4. Tingkat Kehadiran
Asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran

pegawai di bawah standar kerja yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

5. Kerjasama

Keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama antara pegawai dapat ditingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan baik.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya “*like dan dislike*”, dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut. Menurut Mathis dan Jackson (2002), menyatakan pendapatnya bahwa, “Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja pegawai secara individual”. Kemungkinannya antara lain adalah:

- a. Para atasan yang menilai bawahannya.
- b. Bawahan yang menilai atasannya.
- c. Anggota kelompok menilai satu sama sama lain.
- d. Penilaian pegawai sendiri.
- e. Penilaian dengan multisumber.
- f. Sumber-sumber dari luar.

Tujuan Penilaian Kinerja

- a. Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja

seorang pegawai akan tetapi juga memngembangkan serta memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang positif dan semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja yang optimal.

- (2) Wibowo (2007), menyatakan, “Penilaian kinerja seharusnya menciptakan gambaran akurat dari kinerja perorangan. Penilaian tidak dilakukan hanya untuk mengetahui kinerja buruk. Hasil-hasil yang baik dan dapat diterima harus data diidentifikasi sehingga dapat dipakai sebagai dasar penilaian hal lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, sistem penilaian hendaknya terkait dengan pekerjaan dan praktis, termasuk standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang terukur”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini (Zainal Arifin, 2012:54).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan.

Jenis Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena inti dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan terinterpretasikan.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. Adapun yang menjadi data primer dalam penulisan adalah hasil wawancara meliputi :

1. Keterangan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengenai pelaksanaan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Pelalawan.
2. Keterangan dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pengembangan dan Keuangan Desa atau Kelurahan, Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Aset Desa atau Kelurahan, , Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Sub Bagian Program, Serta Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan perihal koordinasi dengan Kepala Desa dalam upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Terpadu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi–dokumentasi, media massa atau keterangan sumber–sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Jumlah Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Desa Terpadu dari Tahun 2013–2015 Kabupaten Pelalawan.
2. Data Jumlah Proposal yang diajukan oleh Desa dari Tahun 2013-2015.

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Drs. Zamur	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	1 orang
2	T. Zulhaini,S.Sos,M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa atau Kelurahan	1 orang
3	Rusli,ST	Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa atau Kelurahan	1 orang
4	Minter Simbolon	Kepala Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pengembangan dan Keuangan Desa atau Kelurahan	1 orang
5	Hermita.SP,M.Si	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	1 orang
6	Zaiman	Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	1 orang
7	Ahmad Gustian.S.Sos	Kepala Sub Bagian Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)	1 orang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau badan yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan disini adalah analisa deskriptif yaitu menggambarkan berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh sebuah analisa data yang telah dikumpulkan dipilah – pilah dalam bentuk penjelasan, data – data yang diperoleh dari informan kemudian dianalisis berdasarkan daya nalar dan pola pikir dalam menghubungkan data – data informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan atau responden yang terpilih sebanyak 7 orang maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu.

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di analisis berdasarkan laporan kinerja dan realisasi penggunaan anggaran yang dibuat oleh Badan tersebut. Berdasarkan Laporan Kinerja dan realisasi anggaran yang telah dibuat penerapannya akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan selama tahun 2013 - 2015. Capaian kinerja (*performance results*) 2013 - 2015 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan di Ukur dari Perspektif Program.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dan target anggaran, serta efektifitas tindakan dalam mencapai

tujuan, Robertson, 2002 dalam Mahmudi "Manajemen Kinerja Sektor Publik" (2007:8).

Tabel 3.1 dapat menginformasikan bahwa total pagu anggaran sebesar Rp.21.329.139.798 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.159.924.992 atau 94,52 % sangat baik karena berada pada nilai interval kinerja (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara,2004)

Realiasi anggaran yang lebih rendah dari target anggaran memiliki implikasi bahwa terjadi efisiensi anggaran dimana jumlah pengeluaran yang sungguh – sungguh terjadi lebih kecil dari target anggaran. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa diatas dua ratus juta menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). Untuk kegiatan pengembangan Desa kurang dari 94,52 % di sebabkan ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang lain sehingga anggaran tidak di realisasikan. Berdasarkan table diatas dapat dianalisa bahwa semua anggaran yang ada terealisasi dengan baik, ini bisa dilihat dari daya serap yang rata – rata diatas 90 %. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa desa yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan karena terbatasnya anggaran dana yang tersedia dengan jumlah desa yang ada. Jika dilihat dari persentase daya serap pengelolaan dana yang diukur dari perspektif program, maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan sangat baik, tetapi jika dilihat dari jumlah desa yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten

Pelalawan belum bisa dikatakan baik karena jumlah anggaran dana yang tersedia hanya bisa digunakan untuk pembangunan beberapa Desa, masih banyak masyarakat Desa yang kecewa dan mengeluh dengan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang secara merata karena keterlambatan anggaran dana tersebut.

Tabel 3.2 dapat dilihat dengan jumlah anggaran Rp.52.499.500 dan realisasi sebesar Rp.51.499.500, dengan daya serap sebesar 98,10 %. Hal ini sudah menggambarkan hasil yang sangat baik. Pencapaian yang tidak mencapai 100 % dikarenakan keterbatasan ruang tempat untuk pelaksanaan, sehingga mengakibatkan sisa anggaran yang tidak mencukupi dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan.

Tabel 3.3 dapat dilihat dengan jumlah anggaran Rp.301.072.900 dan realisasi sebesar Rp.298.672.900, dengan daya serap sebesar 99,20 % hal ini sudah menggambarkan hasil yang sangat baik.

Tabel 3.4 capaian indikator kinerja pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 3.750.000, dari target anggaran sebesar Rp. 3.750.000, sehingga penyediaan jasa surat menyurat dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan jasa surat menyurat meliputi penyediaan bahan – bahan untuk pembayaran belanja Prangko, Materai, Benda Pos Lainnya. Realisasi anggaran tersebut diatas merupakan salah satu wujud efisiensi yang dilaksanakan dan sebagian surat diantar langsung oleh petugas dari pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan.

Pada penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

mencapai target 72,51 persen % dengan realisasi sebesar Rp. 57.427.365, dari target anggaran sebesar Rp 79.200.000, dan terdapat sisa anggaran Rp 21.772.635 di karenakan pada pembayaran biaya air dan telepon sangat sedikit realisasinya, Kegiatan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik meliputi penyediaan peralatan atau sarana komunikasi untuk penyelenggaraan operasional kantor.

Selanjutnya indikator kinerja pada penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional mencapai target 36,14 persen % dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 8.300.000,- dan terdapat sisa anggaran Rp 5.300.000. Pajak kendaraan roda 2 (STNK) tidak di bayar karena roda 2 sudah di mutasi ke Bagian Aset Setda Kabupaten Pelalawan, dan STNK kendaraan Operasional tidak dibayarkan karena sudah di mutasi ke Bagian Aset Setda Kabupaten Pelalawan. Digunakan untuk membayar pajak atau memperpanjang masa STNK yang bertujuan mampu memperlancar urusan dinas selama 1 tahun.

Pencapaian indikator kinerja pada jasa kebersihan kantor ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 90.195.444, dari target anggaran sebesar Rp. 90.195.444, hal ini disebabkan karena pembayaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan yang dibayarkan selama 12 (dua belas) Bulan

Capaian indikator kinerja pada penyediaan alat tulis kantor ini mencapai target 99,80 % dengan realisasi sebesar Rp. 83.662.510 dari target anggaran sebesar Rp. 83.826.110 dan terdapat sisa anggaran Rp 163.600 terselenggaranya kegiatan ini berjalan dengan baik karena pendistribusian Alat tulis kantor ke

Sekretariat dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dan peran aktif aparatur dalam menggunakan alat tulis kantor sudah baik.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi biaya cetak dan fotocopy untuk 6 program pokok yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini telah mencapai target 99.61 % dengan realisasi sebesar Rp 79.641.070 dari target anggaran sebesar Rp 79.960.700 dan terdapat sisa anggaran Rp 319.630.

Realisasi capaian kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor meliputi belanja alat listrik untuk penggantian komponen-komponen yang rusak secara berkala dan apabila ada laporan kerusakan serta belanja listrik. Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini telah mencapai target 100 persen % dengan realisasi sebesar Rp 1.901.500 dari target anggaran yang ditentukan .

Capaian indikator kinerja pada kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini mencapai target 97.93 % dengan realisasi sebesar Rp. 196.243.072, dari target anggaran sebesar Rp. 200.400.000, dan terdapat sisa anggaran Rp 4.156.928 hal ini disebabkan terdapat sisa pembelian pada belanja Moubelair, alat pendingin, Note Book, peralatan mini komputer dan pengadaan lemari.

Capaian indikator kinerja pada Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp.33.600.000, dari target anggaran yang ditentukan . Adapun bahan bacaan yang terealisasi adalah langganan surat kabar dan majalah yang dibayarkan

sangat selektif untuk berlangganan dan publikasi Pajak Daerah.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman ini mencapai target 98,36 % dengan realisasi sebesar Rp 82.872.000, dari target anggaran sebesar Rp 84.250.000, dan terdapat sisa anggaran Rp 1.378.000 kegiatan ini meliputi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Tamu.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ini mencapai target 99.96 % dengan realisasi sebesar Rp 280.991.420, dari target anggaran sebesar Rp 281.100.000, dan terdapat sisa anggaran Rp 108.580 kegiatan ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah yang mencakup wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan belanja perjalanan Dinas ke luar daerah, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Program yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa ini mencapai target 59,25 % dengan realisasi sebesar 44.125.000, dari target anggaran sebesar Rp. 74.475.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 30.350.000, Kegiatan ini merupakan penunjang pelaksanaan pengadaan langsung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tabel 3.5 menunjukkan capaian indikator kinerja pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini mencapai target 91,87 % dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 6.327.554.185, dari target anggaran sebesar Rp 6.887.821.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 560.266.815. Pada kegiatan ini jumlah pembangunan gedung kantor, gapura dan pagar yaitu 15, rehap kantor 7 dan pemasangan paving blok 17.

Capaian indikator kinerja pada Kegiatan ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000, dari target anggaran sebesar Rp. 28.000.000, pada kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran berkala gedung kantor.

Capaian indikator kinerja pada Kegiatan ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 79.500.000, dari target anggaran sebesar Rp. 79.500.000, Sedangkan anggaran untuk bahan bakar dan suku cadang telah dianggarkan. Jumlah kendaraan dinas yang ada pada tahun 2015 ini sebanyak 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Capaian indikator kinerja pada Kegiatan ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.000, dari target anggaran sebesar Rp. 18.000.000, Sedangkan anggaran untuk Pemeliharaan rutin atau berkala rumah jabatan.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai target 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 13.800.000, dari target anggaran sebesar Rp. 13.800.000, Sedangkan anggaran untuk pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan atau peralatan kantor telah dianggarkan.

Pada kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran pelatihan atau kursus singkat dan perjalanan dinas luar daerah. Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.963.406, dari target anggaran yang tersedia Rp 75.965.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 1.594.

Dana yang tersedia untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan Soft Skill Pegawai, capaian indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 98,84 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 295.385.000, dari target anggaran sebesar Rp 298.862.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 3.477.000. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) yang belum maksimal dalam bekerja dengan kemampuan yang dimiliki sesuai latar belakang pendidikan.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 94 % dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 228.992.000, dari target anggaran yang tersedia Rp 244.730.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 15.738.000.

Dalam Kegiatan Pokjandal Posyandu merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehatan. Pelatihan peningkatan peran Pokjandal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa atau Kelurahan. Masalah yang ada sebagian kecil dari masyarakat Kecamatan dan Desa atau Kelurahan tidak terus menerus membawa Balita ke Posyandu.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 94 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 222.568.000, dari target anggaran sebesar Rp 236.055.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 13.487.000

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 96,81 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.960.000, dari target anggaran sebesar

Rp 235.460.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 7.500.000.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 99,96 % dengan realisasi anggaran Rp. 903.025.000, dari target anggaran sebesar Rp 903.430.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 405.000

Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Pedesaan adalah suatu kegiatan pendamping dalam rangka memfasilitasi desa dalam pelaksanaan perekonomian masyarakat melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam serta memfasilitasi aparat desa dalam pendirian atau Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 92,04 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.224.800, dari anggaran yang tersedia Rp 243.620.160 dan terdapat sisa anggaran Rp 19.395.360. Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Pelalawan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan kelembagaan dan keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 92,60 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 263.171.400, dari target anggaran sebesar Rp 284.211.400 dan terdapat sisa anggaran Rp 21.040.000.

Terdapat kelebihan pada kegiatan Honorarium Instruktur atau Narasumber, Pada Kegiatan, Belanja sewa Penginapan disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir, dikegiatan SPPD, luar daerah Ke Jakarta, terdapat kelebihan pada Transportasi.

Pada kegiatan ini digunakan untuk pelatihan aparatur dengan peserta 130 orang di bidang pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

1. Bendahara Desa
2. Pendamping Kecamatan
3. Kasi Ekbang Kecamatan

Bendahara Desa masih membutuhkan Pelatihan agar pengelolaan keuangan Desa tertata dengan baik.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 89,14 persen (%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.83.281.000 dari target anggaran sebesar Rp 93.425.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 10.144.000.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 96,39 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 411.775.000, dari target anggaran sebesar Rp 427.185.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 15.410.000

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 95,43 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000 dari target anggaran sebesar Rp 54.730.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 2.500.000. Terdapat kelebihan pada kegiatan belanja Honorarium PNS.

Capaian Indikator kinerja pada kegiatan ini mencapai 98 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 408.594.000 dari target anggaran sebesar Rp 415.880.000 dan terdapat sisa anggaran Rp 7.286.000.

Berdasarkan dari keseluruhan tabel diatas dapat di analisis bahwa kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan yang diukur dari perspektif program dan kegiatan sudah bisa dikategorikan baik dengan realisasi anggaran rata – rata diatas 90 %. Walaupun ada sebagian kegiatan yang realisasinya di bawah 60 % , namun hal tersebut ada alasan tersendiri salah satu contohnya adanya pajak kendaraan roda 2 yang tidak dibayar karena roda 2 tersebut sudah di mutasikan ke bagian Aset Setda Kabupaten Pelalawan.

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan bantuan pembangunan Desa dengan melihat dari data realisasi berdasarkan program dan kegiatan dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan bantuan pembangunan desa yang diukur dari perspektif program dalam pengelolaan dana pembangunan desa maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan belum bisa dikatakan baik karena belum mampu melakukan pembangunan desa secara merata yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana untuk pembangunan Desa tersebut.
2. Berdasarkan Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan bantuan pembangunan desa yang diukur dari perspektif program kegiatan maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan sudah bisa dikatakan baik karena dengan realisasi anggaran rata – rata diatas 90 %. Walaupun ada sebagian kegiatan yang realisasinya di bawah 60 % , namun hal tersebut ada alasan tersendiri salah satu contohnya adanya pajak kendaraan roda 2 yang tidak dibayar karena roda 2 tersebut sudah di mutasikan ke bagian Aset Setda Kabupaten Pelalawan.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat di kemukakan beberapa saran yang kiranya dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan kedepannya agar lebih meningkatkan jumlah anggaran dana pembangunan desa sehingga pembangunan Desa bisa di laksanakan secara merata dan pembangunan yang ada sesuai dengan anggaran yang ada.
- 2) Bagi Sumber Daya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan diharapkan agar kinerjanya tidak menurun walaupun anggaran dana pembangunan Desa belum memenuhi jumlah keseluruhan Desa yang harus dilakukan pembangunan.
- 3) Bagi masyarakat Desa diharapkan partisipasi dan kerjasamanya dalam upaya pembanguan Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan.
- 4) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah didalam pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia, serta mempersiapkan perencanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pembanguan yang akan dilaksanakan.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator – indikator kinerja lain di setiap perspektif , sehingga dapat menggambarkan hubungan sebab akibat yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andreas Lako, 2004, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi : Isu, Teori dan Solusi, Yogyakarta, Penerbit Amara Books.

- Arifin. Zainal,. 2012. *Penelitian Pendidikan (metode dan paradigma baru)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya
- Dessler, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kesepuluh. Jilid 2. Jakarta : PT. Indeks.
- Djam'an, MA dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- DR.F.C. Gomes, Msi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta, 1995.
- Drs. Slamet Wiyono, AK, MBA, *Manajemen Potensi Diri*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2006.
- Foster & Seeker. 2001. *Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Penerjemah: Ramlan. Jakarta: PPM
- Guritno dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI
- Handoko,.H., 1995, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, BPF, Yogyakarta.
- J. David. Hunger dan Thomas L. Wheeden, *Manajemen Strategis*, Andi, Yogyakarta 2001.
- Mathis, dan Jackson, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat
- Mangkunegara,2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya,Bandung
- Siagian. Sondang.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara.1994.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen SDM cetakan 1*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Suharsimi Arikunto.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta.PT. Rineka Cipta
- Dokumen :**
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 4. Pedoman Umum Pembangunan Desa Terpadu